

SKRIPSI

**KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN JALAN**

**(Studi di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul)**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1)**



Disusun oleh:

JEKSON

Nim: 21520098

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Februari 2025

Jam : 13:00 Wib

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA

Ketua Penguji/Pembimbing

2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

Penguji Samping I

3. Analius Giawa S.IP., M.Si.

Penguji Samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JEKSON
Nim : 21520098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 30 April 2025


JEKSON
21520098



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : JEKSON
Nim : 21520098
Telp : 081365631370
Email : jeksonsakerebau@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengali-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN (STUDI DI KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 April 2025



JEKSON
21520098

MOTTO

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka
dari itu tataplah masa depan dan jangan buat
kesalahan yang kedua kali

(JEKSON)

Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi
kekuatan manusia,
sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu

(1 Korintus 10:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada Tuhan Yesus, yang tanpa-Nya tidak ada satupun yang
jadi atas hidupku.

Kupersembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak
Dertinus dan Ibu Inelti serta adek-adek ku Pira Yanti dan Inessa
keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa
sampai pada tahap ini.

Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah
berhenti

Bapak dan Ibu berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan
Bapak, Ibu dan adek-adek ku
Sebagai keluarga ku

KATA PENGANTAR

Segalah dan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus berkat bimbingan dan penyertaan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan” penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Kepada Bapak Dr, Sutoro Eko Yunanto, M,Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
2. Kepada Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Kepada Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan membantu, membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. Selaku Dosen Penguji 1
5. Kepada Bapak Analius Giawa S.IP., M.Si. Selaku Dosen Penguji 2
6. Kepada Staf Pengajar di Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul yang telah memberikan ruang yang luas kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada sahabat Almamater Angkatan 2021 Prodi Ilmu Pemerintahan.
9. Kepada keluarga yang saya cintai, Bapak Dertinus, Ibu Inelti, Adek Pira Yanti, adek Inessa, dan Kakek Abias, Nenek Ursula, Bajak Adasman,

Tante ius, Om Arnus, Om Nopri, Om Pial. Serta Om, Tante, Kakak, Abang, dan adik-adik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan kepada penulis.

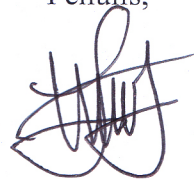
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta, Alliong, Roger, Luti and reni, Beltazar and mismai, Adi, Markel, Seven Metusala S.I.P, M.I.P, Boni Vasius S.Sos, Lano Satrio S.I.P, Margaretha, Audy, Desmil, Reda, Fany, Aples, josep, Ilham, Arga, Rowel, Alex, Teguh, Anverius, Gora, Gibran, waldi, Eiling, Napo, Budi.

11. Kepada teman-teman yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Mentawai Yogyakarta (HPMM)

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari yang sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dalam menyajikan tulisan ilmiah yang baik. Besar harapan penulis kepada para pembaca berupa masukan dan kritikan yang membangun guna perbaikan dan kesempatan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 April 2025

Penulis,



JEKSON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Literature Review.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	19
1. Pengertian Desa.....	19
2. Pemerintah Desa.....	22
3. Pengertian Masyarakat.....	23
4. Pengertian Pembangunan.....	26
5. Pengertian Kolaborasi.....	28
G. Metode Penelitian.....	32
BAB II PEMBANGUNAN KALURAHAN GUWOSARI.....	40

A. Sejarah Desa.....	40
B. Kondisi Geografis Desa.....	41
C. Kondisi Demografi Desa.....	42
D. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya.....	47
E. Sarana dan Prasarana.....	49
F. Pemerintah Kalurahan Guwosari.....	50
G. Pembangunan Kalurahan Guwosari	53
H. Struktur Organisasi Kalurahan Guwosari.....	56
BAB III KOLABORASI.....	57
A. Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan jalan	57
B. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan pinggir jalan.....	64
C. Faktor yang mendukung Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat..	70
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
DOKUMENTASI.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Subjek Penelitian.....	34
Tabel 2.1 Jumlah penduduk berdasarkan umur.....	44
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	45
Tabel 2.3 Tingkat pendidikannya, kondisi perangkat Kalurahan Guwosari.....	45
Tabel 2.4 Nama perangkat Pemerintah Kalurahan Guwosari.....	51

INTISARI

Sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan serta memberi amanah pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikan permasalahan Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Objek penelitian ini adalah Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut : (1) Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sudah ada, namun terdapat keterbatasan anggaran (2) Partisipasi masyarakat ada, namun belum semuanya ikut berpartisipasi. Pemerintah tentu memotivasi seluruh masyarakat supaya setiap program-program yang ada masyarakat tentu ikut berpartisipasi dengan program-program yang ada (3) Faktor yang mendukung kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah pemerintah memberdayakan masyarakat dan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kata-kata Kunci : Pembangunan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Kalurahan Guwosari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia masih merupakan negara berkembang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial menuju tatanan sosial yang lebih baik. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 menjelaskan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses penentuan tindakan di masa mendatang secara matang melalui serangkaian keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan nasional adalah upaya pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, akan mendorong terwujudnya otonomi daerah melalui pemberian kewenangan yang menyeluruh, efektif, dan bertanggung jawab kepada daerah. Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, bermata pencaharian di sektor pertanian, memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, berpegang teguh pada hukum adat, dan dicirikan oleh semangat gotong royong yang kuat (Sholikin, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat disebut desa, desa adat, atau nama lainnya. Desa yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian, desa memiliki otonomi untuk menyiapkan dan mengelola anggarannya sendiri. Salah satu bentuk pemerintahan desa sendiri adalah desa memilih pemerintahannya sendiri dengan memilih kepala desa. Selain itu, desa juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri yang ditetapkan dalam peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan hukum yang ditetapkan oleh walikota desa setelah dibahas dan disetujui oleh badan penasehat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan penduduk pedesaan sebagai sumber daya manusia potensial yang berperan ganda, yaitu sebagai sasaran dan pelaku pembangunan. Ini adalah proyek pembangunan. Sebagian penduduk pedesaan masih memerlukan intervensi berkualitas. Di sisi lain, penduduk pedesaan yang merupakan pelaku utama pembangunan, memegang peranan yang sangat penting sebagai pengambil keputusan (subjek) dalam proses pembangunan pedesaan dan pembangunan nasional.

Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab kepala desa saja, melainkan tanggung jawab seluruh warga desa. Sulit untuk melaksanakan pembangunan desa jika partisipasi masyarakat masih rendah. Sekalipun pemerintah gencar melakukan sosialisasi sumber daya desa untuk mendorong pembangunan di masing-masing desa, namun tanpa adanya

kepentingan masyarakat, sumber daya desa yang tersedia akan sulit dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal, usulan yang disampaikan dalam musrembang desa cenderung dirumuskan oleh elit desa dan sebagian kecil masyarakat, dan realisasi partisipasi masyarakat masih jauh dari harapan. Kegiatan desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Guwosari, pada kenyataannya hanya merupakan kegiatan simbolis yang melibatkan perangkat desa dan beberapa individu yang tidak mewakili seluruh masyarakat Desa Gwosari.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan warga Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, perlu dilakukan upaya peningkatan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan desa adalah pembangunan yang secara langsung menyangkut kepentingan sebagian besar masyarakat di tingkat desa, terlepas dari segala permasalahannya, untuk mencapai tujuan mereka dan bergerak ke arah yang lebih baik bagi komunitas mereka.

Pembangunan yang lebih adil dan sukses hanya dapat dicapai jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Melibatkan masyarakat lokal melalui berbagai bentuk kontribusi, termasuk gotong royong, berpikir kreatif, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, membawa vitalitas dan arah bagi pelaksanaan program pembangunan.

Dalam ruang lingkup penelitian wilayah Kalurahan Guwosari, kolaborasi ini terlihat dari berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sosial budaya dalam skala tingkat Pemerintah Kalurahan. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi isu pembangunan saja, namun juga merupakan isu yang mempunyai peranan strategis dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan kepemilikan atas hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan infrastruktur terkait erat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perluasan infrastruktur berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena peningkatan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran di negara tersebut. Perluasan infrastruktur memajukan kepentingan publik. Perluasan infrastruktur desa niscaya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Misalnya, perluasan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan potensi kawasan tersebut sebagai tujuan wisata yang akan berdampak positif

terhadap perekonomian Kota Madya. Seperti Desa Guwosari, ada beberapa kemungkinan lokal yang dapat dimanfaatkan berkat keindahan alam tempat tersebut. Selain untuk memenuhi permintaan beras, ada pula potensi pengembangan kawasan agrowisata.

Proses perencanaan yang baik akan berujung pada keberhasilan implementasi program dan pada gilirannya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami peran masing-masing elemen dalam berkontribusi mewujudkan Desa Gwosari sebagai desa mandiri. Dalam melaksanakan pembangunan desa diperlukan dukungan pembangunan dan warga dilibatkan dalam pembangunan. Pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pembangunan desa yang telah ada.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah membutuhkan perspektif yang menghantarkan suatu pemerintahan kepada tujuannya. Dalam proses ini membutuhkan suatu acuan dalam pelaksanaannya. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” menulis Mazhab dengan nama Mazhab Timoho terdiri dari 5G yaitu *government, governing, governability, governance, and governmentality*. Salah satu perspektif dari Mazhab Timoho adalah *governance* yang berarti interaksi antara pemerintahan, negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang menyatu menjadi satu kesatuan tata kelola pemerintahan. Pada arti lain *governance* merupakan proses kolaborasi dari pemerintahan dengan

pihak ketiga, sosial dan pasar untuk menghasilkan sebuah karya yang tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, sektor privat di luar pemerintah, dan berdampak pada pemerintah.

Collaborative governance dinilai sebagai suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi pemerintah secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-pemerintah dalam mengambil keputusan yang formal berbasis *consensus*, *deliberative* dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik. Dalam melakukan suatu kolaborasi antar stakeholder baik pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku adat membutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelolah kerja sama tersebut. Tata kelola kolaboratif merupakan konsep representatif untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola antar departemen pemerintah yang berbeda. Hal ini karena peningkatan kapasitas mempunyai kekuatan untuk mengatasi sebagian besar permasalahan yang ada di masyarakat dimana warga berusaha mengendalikan kehidupan mereka melalui negosiasi dengan aktor lain (Innes dan Booher, 2004).

Collaborative governance sebagai bentuk baru dari proses tata kelola yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang berbeda dalam hubungan kerja satu sama lain melalui dialog rutin dan interaksi dalam mengejar tujuan bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut beberapa cara kolaborasi:

1. Dialog dan musyawarah: Mengadakan pertemuan rutin antara pemerintah dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh warga. Ini bisa dilakukan melalui musyawarah desa atau forum komunikasi lainnya.
2. Pengembangan program bersama: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan. Misalnya, jika ada rencana untuk membangun infrastruktur, masyarakat dapat memberikan masukan mengenai lokasi dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan.
3. Pelatihan dan pemberdayaan: Pemerintah dapat mengadakan pelatihan untuk masyarakat agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam pembangunan, seperti pelatihan keterampilan kerja atau manajemen usaha.
4. Partisipasi dalam pengawasan: Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan proyek pembangunan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik.
5. Menerapkan program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.
6. Membangun Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta yang dapat mendukung proyek pembangunan dengan sumber daya dan keahlian mereka. (Gash 2008)

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sangat penting agar meningkatkan pembangunan guna pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan akan berjalan baik bila ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Adanya kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan warga serta memperkuat kepemilikan bersama dan kepemilikan atas hasil-hasil pembangunan. Pandangan ini menekankan perlunya pemerintah bertindak dengan benar dan memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas kelembagaan untuk menerapkan tata kelola yang responsif terhadap kehidupan banyak orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.?”

C. Fokus Penelitian

1. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan
2. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan pinggir jalan
3. Faktor yang mendukung kolaborasi pemerintah dan masyarakat

D. Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kolaborasi Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

E. Literature Review

Penelitian ini mendeskripsikan kolaborasi pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa di desa Gwosari, kecamatan Pajangan, Bantul. Orisinalitas penelitian ini memberikan gambaran perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan data yang ada setidaknya memberikan gambaran dan kondisi terkait topik peneliti untuk mendukung teori yang disampaikan di atas. Beberapa hasil penelitian terkait ditunjukkan di bawah ini.

1. Penelitian Gumilar, E.R. Khaerunnisa, F., Lutfiah, F. Tammi, H.I, dan Jaliluddin, J (2021). yang berjudul Kolaborasi Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Untuk mengembangkan desa diperlukan kolaborasi antar pelaku ekologis administrasi publik dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Program pembangunan desa akan berhasil jika ada kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat Desa Sukamanah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kolaborasi pelaku administrasi publik ekologis di Desa Sukamanah dan menjelaskan tentang kerja sama antar aktor dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam melakukan pembangunan. Tidak semua masyarakat terlibat dalam pembangunan desa, namun hanya perwakilan yang dipilih untuk menjadi pengurus pembangunan. Hingga saat ini, pembangunan desa Sukamanah berjalan lancar dan ada beberapa program yang belum dilaksanakan.

2. Penelitian Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Perencanaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat Desa Warung Bambu dalam perencanaan pembangunan Desa Warung Bambu Kabupaten Karawang.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan teori Sarah Cook dan Steve Macaulay yang terdiri dari empat indikator: pengambilan keputusan, implementasi, kepuasan, dan evaluasi. Partisipasi sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Ada juga kriteria yang jelas untuk merencanakan pembangunan

partisipatif, seperti keterlibatan pemangku kepentingan, kemauan untuk membangun lembaga dalam masyarakat yang inklusif, hukum, langkah-langkah politik berdasarkan prinsip konsultasi yang diikuti oleh konsensus, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada prinsip pembelajaran bersama, yang merupakan aspek prinsip-prinsip demokrasi.

Hasil survei mengungkapkan, pertama, Pemerintah Desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusRemBang) dalam pengambilan keputusan, namun hanya dilakukan satu kali dalam setahun dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, melainkan hanya perwakilan masing-masing desa, yakni kepala desa.

Kedua, pemerintah desa masih belum mampu melibatkan warga karena belum adanya forum bagi warga untuk menyampaikan keinginannya, selain itu Sistem Informasi Desa (SID) pada situs webnya masih bermasalah. Ketiga, manfaat yang diperoleh pemerintah dari keterlibatan publik masih sangat kecil. Keempat, menilai menurunnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan belum direncanakan ke depannya.

3. Penelitian Antono, A., Setiahadi, M., & Ngalimun, N. (2020). Yang berjudul Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang menjadi motor

penggerak pembangunan desa merupakan tantangan besar bagi perangkat desa. Melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat di tingkat lokal merupakan langkah strategis dalam mengelola sumber daya desa dan mencapai hasil yang transparan dan akuntabel sebagaimana diperlukan dalam model tata kelola kolaboratif, guna memastikan hasil pembangunan lebih bermanfaat bagi warga. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode perekrutan informan dilakukan dengan metode snowball sampling dengan tetap menjaga independensi penyampaian pendapat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Analisis data bersifat interaktif dan dimulai dengan pengumpulan data, pemadatan data, penyajian data, dan penggabungan kesimpulan penelitian yang ditarik dengan penyajian data naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dalam dialog antar-masyarakat, pembangunan kepercayaan, keterlibatan masyarakat, dan pemahaman yang berbeda tentang pembangunan, yang berdampak pada hasil pembangunan yang efektif, baik fisik maupun tidak berwujud.

4. Penelitian Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodig Driszal Fryantoni 2021, yang berjudul Kolaborasi dan Sinergitas antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata di Kebun Raya Cibinong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dan

menganalisis perannya berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Selain itu, analisis terhadap seluruh keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan untuk mengukur dampak penerapan kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan. Analisis menemukan bahwa pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam empat kategori analisis peran berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya: aktor, aktor kunci, pengikut, dan pendukung. Dampak pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Cibinong terlihat jelas dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

5. Penelitian Diana dan Lugman Hakim 2020, yang berjudul Strategi Kolaborasi Antara Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Inovasi Pendidikan dan Kreatifitas Pembelajaran di Perguruan Tinggi. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi potensi kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, dunia usaha, pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menginisiasi kolaborasi yang sejalan dengan Program Kampus Merdeka. Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei perpustakaan. Perpustakaan memperoleh data dengan berkonsultasi pada literatur terkait seperti artikel, buku, dokumen, dan lain-lain, atau dengan berkonsultasi pada literatur daring. Data tersebut kemudian dianalisis dan dijelaskan dalam bahasa yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Sumber sekunder saat ini diperoleh dari artikel jurnal

nasional dan internasional, undang-undang negara bagian, dan sumber internet lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi wacana dari artikel jurnal akademik nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan pemerintah, dan web (Internet). Studi tersebut menyimpulkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan industri dapat menguntungkan kedua belah pihak. Berinvestasi dalam pengembangan kemampuan penelitian universitas dan industri di bidang penelitian masing-masing, dan melalui kerja sama penelitian, kita dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan industri dan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini pada akhirnya juga akan menguntungkan pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Penelitian Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018), yang berjudul Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui kajian pustaka, penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Survei tersebut mengungkap bahwa kerja sama pemerintah dalam pengembangan wilayah pesisir masih sangat rendah

bahkan di tingkat pemerintah daerah. Para pihak hanya berfokus pada tugas dan perannya saja dan menjaga kontak satu sama lain seminimal mungkin.

7. Penelitian Pasaribu, A., Sitanggang, A., & Ivanna, J. (2024), yang berjudul Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Percut Sei Tuan Dusun 1. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji berbagai bentuk kolaborasi dalam aspek perbaikan infrastruktur, pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial dan budaya, partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta pengelolaan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat menghasilkan kemajuan yang signifikan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa menciptakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan inklusif, serta memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Model kolaborasi ini diidentifikasi sebagai praktik terbaik yang dapat direplikasi oleh desa lain dalam upaya mencapai kemakmuran bersama.
8. Penelitian Nurul Fajar 2022, yang berjudul Kolaborasi antar Institusi dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan Desa Margamulya, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah survei purposive sampling. Berdasarkan hasil kajian tentang kerjasama antar instansi dalam pengembangan Desa Margamulya, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, secara teoritis masih belum optimal. Menurut Emerson (Suryani, 2013:11), tata kelola kolaboratif secara luas didefinisikan sebagai proses dan struktur, serta manajemen dan pembuatan kebijakan, yang berupaya melibatkan masyarakat secara konstruktif di seluruh aktor publik, tingkat pemerintahan, tingkat swasta, dan batas-batas kelembagaan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Hal ini tercermin dari kendala yang dihadapi pemerintahan desa. Hal ini mungkin kurang mengikat jika timbul perselisihan dengan pengelola fasilitas masyarakat desa, dan masih ada pihak luar yang tidak terlibat dalam pengelolaan tetapi ikut campur dalam pengelolaan atas nama perwakilan masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana masyarakat desa di lingkungan Kecamatan, pengawasan antara Pemerintah Desa dengan Pengelola Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa masih kurang. Hal ini menciptakan situasi yang suboptimal. Dan inisiatif berikut akan diambil: (1) Pemerintah Desa dan pengelola sarana dan prasarana masyarakat Desa mengkaji ulang upaya agar setiap program pengelolaan sarana dan prasarana masyarakat Desa terlaksana secara optimal. (2) Pemerintah Desa dan pengelola sarana dan prasarana masyarakat Desa wajib memberitahukan kepada semua pihak yang

berkepentingan tentang kewajibannya untuk mencegah campur tangan pihak luar. (3) Pemerintah Desa dan pengelola sarana dan prasarana masyarakat Desa agar lebih menekankan pada pengawasan kinerja pengelolaan sehingga terjalin hubungan kerjasama yang baik antara pengelola dengan masyarakat.

9. Penelitian Misra dan Muhammad Tamrin 2023. yang berjudul Analisis Kolaborasi Pemerintahan Desa terhadap Komitmen Organisasi pada Masyarakat Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai komitmen organisasi yang memediasi kolaborasi pemerintah desa terhadap kualitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di Desa Bontojai, Kecamatan Bisap, Kabupaten Banteeng, Sulawesi Selatan. Survei dilakukan di Kantor Desa Bontojai, Kecamatan Bisap, Kabupaten Banteeng, Sulawesi Selatan, dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan terhitung dari bulan November sampai dengan Desember 2022. Subjek penelitian ini adalah semua kepala rumah tangga yang di Desa Bontojai yang terdiri dari tiga kelurahan dengan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 563 kepala rumah tangga. Teknik analisis data sampling digunakan dalam penelitian ini. Ini melibatkan pembagian populasi semua pemukiman yang ada dan memilih sampel acak dari semua kepala rumah tangga di setiap pemukiman yang telah memanfaatkan layanan Kantor Desa Bont Jai dan menggabungkan

semuanya untuk memprediksi tolak ukur populasi, sampel yang digunakan mencakup 150 kepala rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui analisis jalur. Kajian tersebut menemukan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Bont Jai, Kecamatan Bisap, Kabupaten Banteeng, Sulawesi Selatan, dapat ditingkatkan melalui kerja sama antarpemerintah desa dan keterlibatan kelembagaan.

10. Penelitian Elsa Trisniati 2022 yang berjudul *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Penjelasan kami tentang tata kelola kolaboratif didasarkan pada model tata kelola kolaboratif, yang menekankan empat aspek: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang mendukung, dan proses kolaboratif. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membutuhkan data primer dan sekunder. Data penelitian primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mendalam, sedangkan data penelitian sekunder dikumpulkan melalui dokumen. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang berbasis pada aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan suportif dan proses kolaboratif belum

berfungsi optimal dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Studi ini merekomendasikan peningkatan sumber daya untuk membantu masyarakat bekerja sama. Pemerintah memberikan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat agar aktif berkolaborasi dan membentuk forum khusus sebagai tempat komunikasi dan diskusi tentang visi misi yang ingin dicapai bersama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

Berdasarkan analisis pada beberapa studi terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk menutup celah Penelitian tersebut terutama berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan studi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Perbedaan analisis ini dengan analisis pada beberapa studi terdahulu terletak pada topik penelitian serta subjek penelitian. Posisi peneliti terhadap penelitian beberapa studi terdahulu untuk menjelaskan masalah tentang Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan studi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Desa

Desa adalah wilayah tunggal yang dihuni oleh beberapa keluarga, masing-masing dengan struktur politiknya sendiri (dipimpin oleh kepala desa). Desa adalah sekelompok rumah yang membentuk suatu unit di luar kota. Pembentukan desa dilakukan atas prakarsa beberapa kepala

keluarga yang mendiami desa tersebut, dengan mempertimbangkan asal usul daerah, bahasa, adat istiadat, perekonomian, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, yang pada akhirnya berujung pada terbentuknya desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dihuni oleh sejumlah besar keluarga yang bermukim dan memiliki harapan untuk dapat mempertahankan penghidupan mereka serta mencapai kesejahteraan dan yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka.

Desa adalah unit pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa berbeda dengan distrik, yang memiliki status lebih rendah daripada kepala distrik. Kecamatan hanya merupakan wilayah kerja lulla untuk menyelenggarakan pemerintahan kecamatan dan tidak mempunyai hak mengatur serta menguasai kepentingan masyarakat setempat. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat Istimewa. landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman 2018: 84).

Hal ini jelas dari beberapa definisi yang dikutip oleh Bintarto (1983:1).

- a. Menurut Finch Desa pada hakikatnya merupakan kawasan pemukiman dan juga merupakan pusat kegiatan perdagangan. Desa

tersebut sebagian terdiri dari rumah-rumah pertanian yang dihubungkan oleh bangunan tambahan.

- b. Menurut William Desa terdiri dari suatu kesatuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah yang terbatas.
- c. Menurut Mitra Sebuah desa lebih dari sekedar kumpulan rumah. Desa merupakan suatu kawasan pertanian padat yang mempunyai batas-batas yang tetap.
- d. Menurut Bunner Desa adalah suatu tempat yang jumlah penduduknya antara 250 sampai dengan 2.500 jiwa.
- e. Penjelasan resmi Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa desa adalah wilayah yang dibentuk oleh persatuan satu atau beberapa wilayah (di Sumatera nagari, marga, dan sebagainya) yang memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusannya.
- f. Menurut Arifin Desa adalah sebagai satu kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan tingkat organisasi yang lebih sederhana, dengan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian
- g. Desa pada hakikatnya merupakan gabungan kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil kombinasi ini adalah interaksi faktor fisik, geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta hubungannya dengan wilayah lain.

Berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa Kalurahan adalah sebutan Kalurahan DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon. sejak tahun 2020, nama-nama kelembagaan kecamatan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dikembalikan seperti pada zaman Kerajaan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak leluhur, dan hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan (2012) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

Pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan demokratis akan lebih kuat, lebih sah, dan efektif bila didukung oleh koordinasi, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan perubahan yang signifikan, baik dalam hal kepemimpinan maupun kinerja birokrasi, dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Pengertian Masyarakat

Secara umum masyarakat sebagai terjemahan dari istilah society berarti sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup (semi terbuka) yang di dalamnya sebagian besar

interaksi terjadi antara individu-individu anggota kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berasal dari bahasa Arab “musyarak”. Lebih abstraknya, masyarakat adalah jaringan hubungan antara entitas. Masyarakat adalah komunitas yang saling bergantung. Secara umum istilah masyarakat digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur (Radiansyah, 2008:214).

Menurut (Koentjaraningrat 2000) masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki sistem sosial yang diatur oleh norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Masyarakat merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas. Keseluruhan yang kompleks sendiri berarti bahwa

keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan.

Ketika sekelompok orang memiliki pemikiran, perasaan, dan sistem/aturan yang sama, kita dapat berbicara tentang masyarakat. Kesamaan ini mengarahkan orang untuk berinteraksi satu sama lain berdasarkan minat bersama. Bisnis sering kali terstruktur di sekitar sumber pendapatan utama mereka. Ilmuwan sosial membedakan antara masyarakat berburu, masyarakat agraris, dan masyarakat agraris intensif, yang juga disebut masyarakat beradab. Dalam pandangan Parsons (2009), masyarakat berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendukung integrasi dalam berbagai kelompok yang ada di dalamnya.

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Masyarakat adalah sekelompok orang, baik besar maupun kecil, yang tentu saja saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Pengaruh timbal

balik mengacu pada pengaruh yang terjadi secara alami dan hubungan psikologis, yang merupakan unsur-unsur yang pasti ada dalam masyarakat. Masyarakat bukan berarti kumpulan orang saja, harus ada hubungan antara orang-orang. Ia melambangkan suatu kesatuan yang terus berubah, muncul dari suatu proses, dan membuat perbedaan dalam kehidupan manusia.

4. Pengertian Pembangunan

Menurut Simamora (2006: 7) mengemukakan pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap politiknya, dan memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Pembangunan merupakan suatu proses sistematis yang setidaknya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah input atau bahan masukan yang ditransformasikan, yang kedua adalah proses transformasi atau cara pengolahan bahan masukan tersebut, dan yang ketiga adalah output atau hasil transformasi. Proses sistematis sistem ini terhubung dengan sistem lain, termasuk subsistem dan lingkungan internasional. Pembangunan yang terjadi harus dijalankan dan direncanakan secara sadar. Artinya, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu

menunjukkan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai upaya mencapai kemajuan dalam kehidupan nasional. Namun, bagi kebanyakan orang, pembangunan selalu dimaknai sebagai wujud fisik. Luas fisik tersebut menjadi ukuran pengakuan bahwa pembangunan Indonesia saat ini membawa banyak perubahan bagi negara, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Jalan lebar dan mulus dibangun beserta berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan PDAM. Jangan lupa berbagai fitur kenyamanan yang berkembang seiring kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap keadilan sosial. (Siagian, 2000: 15)

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Pembangunan adalah suatu proses transformasi sosial yang mengharapkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kemajuan sosial dan material, termasuk keadilan yang lebih besar, kebebasan dan kualitas berharga lainnya melalui kontrol yang lebih besar, yang ditujukan

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari lingkungannya. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses ikut serta dalam segala bidang perubahan sosial masyarakat dengan tujuan mencapai kemajuan sosial dan material, termasuk pemerataan dan kebebasan yang lebih besar dalam membentuk lingkungan.

5. Pengertian Kolaborasi

“Kolaborasi” merupakan gabungan kata “bersama” dan “kerja” dan mengacu pada penyatuan energi atau penyatuan keterampilan untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan atau disepakati bersama. Lebih jauh lagi, istilah “kolaborasi” sering digunakan untuk menggambarkan proses menyelesaikan pekerjaan lintas batas, sektor, hubungan, organisasi, dan bahkan negara (O’Leary, 2010).

Secara terminologis, kolaborasi memiliki arti yang sangat umum dan luas. Ini menggambarkan situasi ketika dua orang atau lebih individu atau organisasi bersama-sama memahami masalah masing-masing dan kemudian mengembangkan hubungan kolaboratif guna saling membantu memecahkan masalah tersebut. Lebih khusus lagi, kolaborasi berarti bekerja sama secara intensif untuk mengatasi permasalahan kedua belah pihak secara bersamaan.

Namun pemahaman ini bukanlah satu-satunya pemahaman tentang konsep kerja sama. Seperti halnya dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya, konsep kolaborasi dalam bidang ilmu-ilmu sosial memiliki makna yang kompleks tergantung pada perspektif para profesional yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, ada banyak definisi lain yang mencoba menjelaskan kolaborasi dan telah diajukan oleh berbagai ahli dengan perspektif berbeda. Namun, keberagaman pandangan yang berbeda-beda ini selalu didasarkan pada prinsip yang sama: persatuan, kerja sama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama, konsensus, dan akuntabilitas antara pihak-pihak yang bekerja sama. Bidang dan aspek kerja sama begitu kompleks dan saling terkait sehingga tidak mudah menemukan definisi kerja sama yang tunggal, lengkap, terperinci, dan komprehensif.

Secara umum, kerjasama adalah adanya suatu pola dan bentuk hubungan antara orang perseorangan atau organisasi yang sepakat atau ingin sepakat untuk saling berbagi, berpartisipasi penuh, dan melakukan tindakan bersama dengan cara saling bertukar informasi, sumber daya, dan kepentingan, serta berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama, guna mewujudkan cita-cita, mencapai tujuan bersama, atau memecahkan berbagai masalah yang dihadapi para pihak yang bekerja sama. Pengertian tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh Roschelle

dan Teasley yang mengatakan bahwa *collaboration more specifically as “mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together”* (Lai, 2011: 4). lebih lanjut, Roschelle dan Teasley menjelaskan bahwa *collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence,*

Matos dan Afsarmanesh (2008) mengatakan bahwa kolaborasi merupakan sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab atas sebuah program kegiatan yang direncanakan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Ansell and Gash (2007: 544) menjelaskan *collaborative governance* merupakan pemerintahan atau lembaga-lembaga publik pemangku kepentingan (*stakeholder*) non-Pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada kesepakatan dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Pendapat tersebut didukung dengan Emerson et.al. (2011:2) yang menyatakan *collaborative governance* merupakan proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang

secara konstruktif pada batas batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan.

Konsep *collaborative governance* menjelaskan terkait keterlibatan institusi manapun yang sedang memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menjelaskan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, serta evaluasi. Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. *Pertama*, rencana kegiatan pasti bermula dari pemain maupun pelaku yang memiliki tujuan jelas untuk menggambarkan kepentingan umum yang lebih bermanfaat. *Kedua*, semua pemangku kepentingan dan institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. *Ketiga*, Kolaborasi antar institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut (Sudarmo, 2011).

Collaborative Governance merupakan tata kelola yang mana pembangunan tidak hanya ditentukan dan dilaksanakan oleh salah satu pihak melainkan semua pihak yang kepentingan. Dalam hal ini pemerintah bersama dengan semua pihak yang berkepentingan di dalamnya mulai dari masyarakat serta *private sector* yang terlibat di wilayah pembangunan itu dilaksanakan.

Dalam melakukan suatu kolaborasi antar stakeholder baik pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat dan pemangku adat membutuhkan wadah atau institusi yang akan mengelolah kerja sama tersebut. Tata kelola kooperatif adalah suatu konsep yang menggambarkan pemahaman prinsip-prinsip tata kelola antara berbagai cabang pemerintahan. Hal ini karena kapasitas pembangunan dapat mengatasi sebagian besar masalah dalam masyarakat modern, di mana orang berusaha mengendalikan kehidupan mereka sendiri melalui negosiasi dengan aktor lain.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memecahkan masalah atau mendapatkan pemahaman yang sistematis dan terorganisir tentang suatu fenomena untuk menemukan solusi. Metode penelitian membantu mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memvalidasi temuan. Tujuannya termasuk pengembangan teori, dan memberikan solusi untuk masalah yang diidentifikasi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan pernyataan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif meneliti peristiwa atau

fenomena dalam kehidupan individu dan meminta individu atau kelompok individu untuk berbicara tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Rusli, 2014).

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2001: 5)

Sugiyono (2013: 24) menjelaskan lebih lanjut penelitian kualitatif digunakan untuk memahami interaksi sosial, karena interaksi yang kompleks dapat diurai apabila peneliti melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.

Terhadap masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menggunakan metode kualitatif agar bisa menjelaskan penggambaran yang menyeluruh pada sebuah objek permasalahan, terkait tentang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

2. Lokasi/Setting Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan permasalahan. maka penelitian ini akan dilakukan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya ketersediaan data yang dapat membantu jalannya penelitian, serta

peneliti ingin menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks pembangunan tingkat Kalurahan.

3. Subjek Penelitian

Peneliti menentukan informan yang dianggap mempunyai kewenangan dan pengetahuan yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini informan meliputi: Lurah, Perangkat Kalurahan, dukuh, Tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat Kalurahan Guwosari.

Tabel 1.1

Subjek Penelitian

No	Nama Narasumber	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan/Jabatan
1	Nur Hidayat, SE	DIPLOMA IV/STRATA 1	Carik
2	Nurholis. S.Sos.I	DIPLOMA IV/STRATA 1	Bamuskal
3	Umar Wanto	SLTA/SEDERAJAT	Ulu-Ulu
4	Sulisman	SLTA	Dukuh
5	Siswanto	SMP	RT 004
6	Darmanto	SMA	RT 001
7	Rita	SMP	Buruh Harian Lepas
8	Mursiti	SMA	Buruh Harian Lepas
9	Muhammad Taufik	SLTA	LPMK

Sumber data: data lapangan penelitian 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data dan menemukan inti masalah sesuai dengan topik penelitian. Menurut Sugiyono (2017:101) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan data sekunder, dengan berbagai cara. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Nasution (2003:56) menjelaskan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta yang kaitannya dunia kenyataan yang diperoleh melalui pengamatan.

Syaodih N (2006:220) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung.

Jadi, observasi adalah pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data yang

perlu dikumpulkan dalam konteks penelitian. Dengan ini, Peneliti akan melakukan observasi di Kalurahan Guwosari sebagai tempat penelitian ini. Penelitian mengamati kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Setelah melakukan observasi yang dimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan di Kalurahan Guwosari untuk kolaborasi sudah berjalan dengan baik namun, belum semuanya mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan dalam musyawarah kalurahan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan terjadi antara dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawabnya (Moleong, 2001:135). Peneliti mewawancarai informan yang diyakini memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang sedang diselidiki. Wawancara adalah yang dimana peneliti melakukan wawancara dari beberapa informen untuk mengamati kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan.

Setelah melakukan wawancara dari beberapa informen untuk mengamati kolaborasi pemerintah dan masyarakat bahwa kolaborasi khususnya di Kalurahan Guwosari sudah berjalan baik setiap ada program dari pemerintah tentunya masyarakat ikut terlibat dengan adanya program dari pemerintah

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata Latin *docere* yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris, disebut "*document*" yaitu "*something written on printed, to be used as a record or evidence*" yang berarti "sesuatu yang ditulis dalam bentuk cetak dengan maksud untuk digunakan sebagai catatan atau bukti. (Komariah, 2013: 146)

Untuk kebutuhan penelitian, penulis membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan mungkin pendukung suatu kebenaran. Pada penelitian ini, peneliti, membutuhkan dokumen seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan desa yang berkaitan dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati dalam sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki batas wilayah dan kekuasaan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah lapangan selesai. Nasution (Sugiyono, 2015:245) mengatakan "analisis telah

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih berfokus pada proses selama di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data”.

Sugiyono (2010) menjelaskan analisis adalah proses pencarian dan penyuntingan data yang diperoleh secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data menjadi satuan-satuan, melakukan sintesis dan menyusunnya menjadi pola, memilih yang penting atau perlu diselidiki, dan menarik simpulan sehingga data tersebut dapat dipahami sendiri dan orang lain. Miles dan Huberman (Sugiyono: 2015) menyarankan hal berikut untuk analisis data dalam penelitian:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk meringkas dan mereduksi temuan suatu penelitian dengan menekankan apa yang dianggap perlu dan penting oleh peneliti. Tujuan reduksi data adalah untuk membuat data yang terkumpul lebih mudah dipahami dan memberikan gambaran yang lebih lengkap dengan data yang direduksi.

2. Display Data

Display data merupakan data penelitian yang dirangkum secara rinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh.

Pengumpulan data yang komprehensif dan rinci. Kemudian, carilah pola hubungan untuk menarik kesimpulan yang benar. Penyajian data selanjutnya berupa penjelasan atau laporan sesuai dengan temuan penelitian yang diperoleh.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari proses penelitian yang memberi makna pada data yang dianalisis. Proses pengolahan data diawali dengan penataan data lapangan (data mentah) kemudian direduksi dalam bentuk standarisasi dan klasifikasi data. Ini adalah prosedur pemrosesan data yang akan dilakukan peneliti saat melakukan penelitian ini. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, diharapkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

BAB II

PEMBANGUNAN KALURAHAN GUWOSARI

A. Sejarah Desa

Desa Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kapanewon Pajangan kabupaten Bantul. Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah 830.01·10 hektar dan berbatasan langsung dengan lima Kalurahan berikut: Pada masa kolonial, yaitu sebelum tahun 1995, kerajaan merupakan sistem politik yang dominan, terutama di Yogyakarta. Dalam perkembangan pasca kemerdekaan Indonesia, telah terjadi banyak perubahan baik dalam struktur politik maupun bidang tanggung jawab. Salah satu contohnya adalah Desa Guwosari yang terdiri dari dua Desa Selarong dan Iroyudan.

Seiring berjalannya waktu, tepatnya menjelang kemerdekaan Republik Indonesia terjadi penyatuan antar wilayah Kalurahan, khususnya antara Kalurahan Selarong dan Kalurahan Iroyudan. Penggagas pertukaran ini adalah Lurah Wonodiryo (Lurah Selarong). Pada bulan Oktober 1947, Desa Selarong digabungkan dengan desa Iroyudan dan diberi nama baru "Guwosari." "Gwo" adalah sebuah gua di Selarong yang dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro pada masa penjajahan dan kini menjadi objek wisata terkenal di Gua Selarong. "Sari" juga membentuk inti yang menyatukan dua distrik yang lebih kecil. Yang menjadi ciri khas Desa Guwosari adalah Gua Selarong. Jika masyarakat berjalan ke utara dari Balai Masyarakat Desa Guwosari, dan akan mencapai pemukiman Kembang Putih. Sukrowardi menjabat

sebagai Lurah pertama desa tersebut dari tahun 1946 hingga 1961. Pada tahun 1961. Lurah digantikan oleh Ngumar, yang memegang jabatan tersebut hingga tahun 1988. Dari tahun 1988 hingga 1992, Budiman bekerja sebagai Lurah karyawan sementara. Pemilihan kepala desa pertama diadakan pada tahun 1992 dan M. Daim Rahardjo terpilih menjadi kepala desa, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1995.

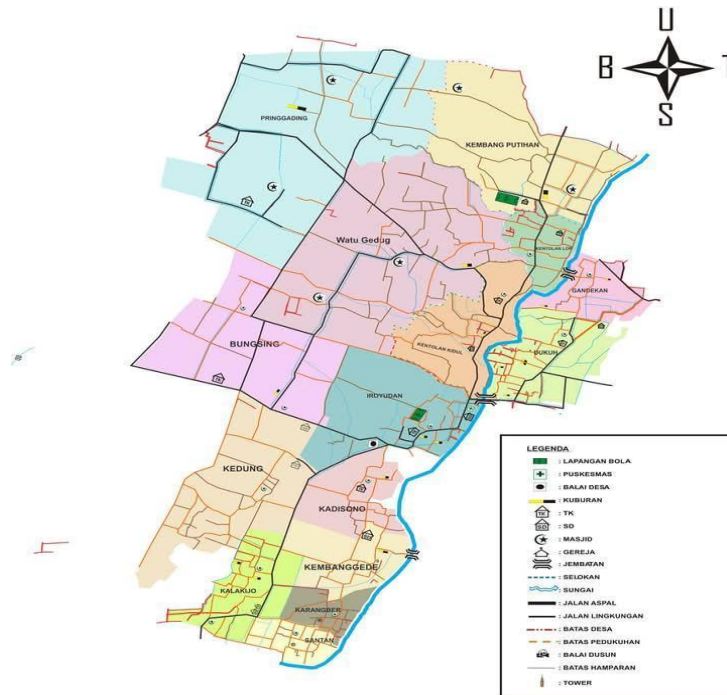
B. Kondisi Geografis Desa

1. Peta Wilayah Kalurahan Guwosari

Peta adalah representasi datar permukaan bumi pada skala tertentu. Peta regional adalah peta atau gambar yang mencakup wilayah atau area tertentu. Peta regional adalah peta yang menggambarkan ruang suatu kesatuan geografis, termasuk semua unturnya, yang batas-batasnya dan sistemnya ditentukan menurut aspek administratif atau fungsional.

Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah 830,00 hektare dan jumlah penduduk 13.875 jiwa. Kecamatan Gwosari secara administratif terbagi menjadi 15 Padukahan meliputi Kembang Putih, Kembang Lor, Kentololan Kidul, Gandekan, Dukuh, Iroyudan, Kadisono, Kembang Gede, Karangber, Santan, Kalakijo, Kedung, Bungsing, Watugedung dan Pringading.

PETA DESA GUWOSARI



Sumber data : Data monografi Kalurahan Guwosari 2023

Seperti terlihat pada peta di atas, wilayah kekuasaan Desa Guwosari cukup luas. Setiap daerah memiliki kemungkinannya sendiri. Dengan pengelolaan dan pengembangan yang tepat, dapat merata secara meningkatkan kesejahteraan masyarakat Guwosari.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah merupakan kesatuan geografis yang mempunyai batas-batas tertentu, dan komponen-komponen dalam kesatuan tersebut mempunyai hubungan dan keterhubungan fungsional satu dengan yang lain (Rustiadi et al., 2011).

C. Kondisi Demografi Desa

Demografi secara umum merujuk pada cabang ilmu pengetahuan yang membahas jumlah, distribusi, dan komposisi populasi manusia.

Perubahan dan penyebabnya biasanya disebabkan oleh kelahiran, pergerakan penduduk, dan mobilitas sosial.

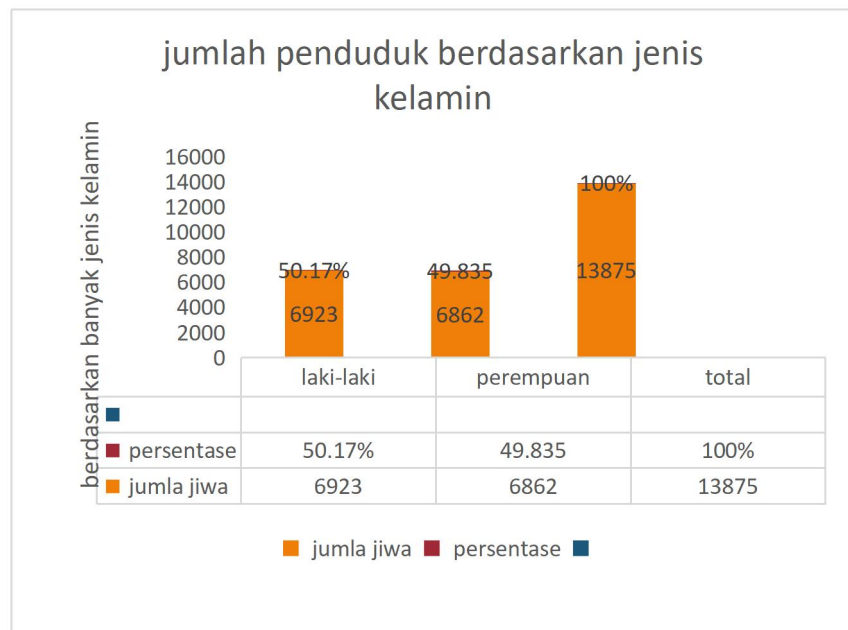
Berikut ini jumlah penduduk Desa Guwosari. Jumlah penduduk Desa Guwosari adalah 13.875 jiwa, yang terdiri dari 6.923 jiwa laki-laki dan 6.862 jiwa perempuan. Kepadatan penduduknya 3.577,97 jiwa.

Berikut di bawah ini tabel rincian penduduk:

1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Grafik 2.1

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.



Sumber data: data monografi Kalurahan Guwosari tahun 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Guwosari berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki berjumlah 6.923 jiwa atau sekitar 50,17% dari total penduduk, dan penduduk perempuan sebanyak 6.862 jiwa atau sekitar 49,83% dari total penduduk.

2. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 2.1

jumlah penduduk berdasarkan umur

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Di bawah 1 tahun	33	31	64
2	2 s/d 4 tahun	139	117	256
3	5 s/d 9 tahun	374	342	716
4	10 s/d 14 tahun	461	424	885
5	15 s/d 19 tahun	474	460	934
6	20 s/d 24 tahun	487	473	960
7	25 s/d 29 tahun	471	515	986
8	30 s/d 34 tahun	473	501	974
9	35 s/d 39 tahun	471	540	1011
10	40 s/d 44 tahun	592	590	1182
11	45 s/d 49 tahun	617	534	1151
12	50 s/d 54 tahun	514	489	1003
13	55 s/d 59 tahun	523	486	1009
14	60 s/d 64 tahun	389	370	759
15	65 s/d 69 tahun	344	325	669
16	70 s/d 74 tahun	191	198	389
17	Di atas 75 tahun	369	465	834
18	0 s/d 18 tahun	1393	1288	2681
	Jumlah	8315	8148	16463
	Belum mengisi	1392	1286	2678
	Total	6923	6862	13785

Sumber data: data monografi kalurahan Guwosari 2023

Distribusi populasi menurut kelompok usia pada tabel 2.1 di atas menunjukkan persentase usia populasi. Jumlah penduduk terbanyak di Desa Guwosari merupakan kelompok usia produktif (40-44 tahun) sebanyak 1.182 jiwa, dan kelompok usia lanjut (45-49 tahun) sebanyak 1.151 jiwa. Persentase terkecil terdapat pada kelompok usia lanjut (di bawah 1 tahun) yakni 66 tahun. Jumlah penduduk muda (usia 0-18 tahun) dan jumlah penduduk lanjut usia (usia 65 tahun ke atas) disebut penduduk non produktif. Karena Guwosari memiliki jumlah penduduk yang relatif

besar, yaitu 13.785 jiwa, pemerintah desa harus mampu memberikan perhatian yang sama kepada penduduknya dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang beragam pekerjaannya

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kalurahan

Guwosari.

NO	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	1294	1253	2547
2	Mengurus Rumah Tangga	204	1128	1332
3	Pelajar/mahasiswa	1125	1131	2256
4	Pensiunan	96	47	143
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	164	117	281
6	Tentara nasional indonesia	21	4	25
7	Kepolisian RI (Polri)	42	8	50
8	Perdagangan	38	37	75
9	Petani/pekebun	219	257	476
10	Peternak	11	3	14
11	Nelayan/perikanan	2	2	4
12	Industri	1	1	2
13	Transportasi	4	1	5
14	Karyawan swasta	739	522	1262
15	Karyawan BUMN	11	1	12
16	Karyawan BUMD	6	3	9
17	Karyawan honorer	17	6	23
18	Buruh harian lepas	1834	1353	3187
19	Buruh tani/perkebunan	250	219	469
20	Buruh nelayan/perikanan	0	1	1

21	Buruh peternakan	3	0	3
22	Pembantu rumah tangga	15	21	36
23	Tukang batu	36	46	82
24	Tukang kayu	17	10	27
25	Tukang las/pandai besi	1	0	1
26	Tukang jahit	1	8	9
27	Penata Rias	0	1	1
28	Mekanik	6	5	11
28	Seniman	7	3	10
30	Tabib	0	4	4
31	Paraji	12	10	22
32	Pendeta	1	0	1
33	Wartawan	1	0	1
34	Dosen	6	5	11
35	Guru	34	63	97
36	Pengacara	3	0	3
37	Konsultan	1	0	1
38	Dokter	3	1	4
39	Bidan	1	7	8
40	Perawat	5	19	24
41	Apoteker	0	1	1
42	Pelaut	1	0	1
43	Peneliti	2	0	2
44	Sopir	11	0	11
45	Pedagang	9	19	28
46	Perangkat desa	20	4	24
47	Kepala Desa	1	0	1
48	Wiraswasta	632	513	1145
49	Lainnya	11	18	29
	Jumlah	6918	6855	13773
	Belum mengisi	5	7	12
	Total	6923	6862	13785

Sumber data: Data Monografi kalurahan Guwosari 2023

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Guwosari bekerja sebagai buruh tani, buruh tani dan wiraswasta, disusul oleh PNS, TNI/Polri dan petani. Namun sebagian warga Guwosari juga melakukan pekerjaan sambilan dan pekerjaan lainnya.

D. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Secara sosial budaya, sebagian besar penduduk Desa Guwosari adalah suku Jawa dan budaya serta kehidupan sehari-hari mereka masih kental dipengaruhi budaya Jawa. Buktinya, masih banyak masyarakat yang menggelar acara adat Jawa, pentas seni, dan membangun situs cagar budaya guna mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal Desa Guwosari banyak menyampaikan ajaran tentang penanaman karakter yang baik. Salah satu contohnya adalah kerja sama yang saling menguntungkan, hubungan yang harmonis, dan budaya saling berkolaborasi. Ajaran yang terkandung di dalamnya mengajarkan manusia untuk senantiasa bekerja sama satu sama lain dalam segala aspek.

Nilai-nilai ini masih hidup dan berkembang di masyarakat Guwosari. Hal ini terbukti dalam pekerjaan yang kita lakukan bersama, dalam bentuk pendanaan, ide, dan energi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain upacara pernikahan, kelahiran, kematian, ulang tahun, bersih desa dan makam, perayaan hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan, pendirian PAUD PKK dalam rangka peningkatan mutu pendidikan masyarakat Guwosari khususnya anak-anak, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersama-sama. Secara ekonomi, pembagian wilayah Kalurahan Guwosari berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

1. Kawasan Pertanian

Wilayah tersebut merupakan daerah penyangga produksi pertanian dan meliputi dusun Gandekan, Dukuh, sebagian Kembanggede, dan

Santang. Daerah ini berfungsi sebagai daerah penyangga produksi padi di Desa Guwosari.

2. Kawasan Pusat Pemerintahan

Balai Kota Guwosari terletak di area ini. Balai Kota Guwosari terletak di pemukiman Iroyudan dan merupakan pusat administrasi Kalurahan Guwosari.

3. Kawasan Kerajinan

Daerah tersebut meliputi Padukuhan Santang yang terkenal dengan kerajinan Batoknya, Padukuhan Kentolan Kidul dengan kerajinan Blankon, Padukuhan Watgedug dengan kerajinan patung, dan Padukuhan Pringgading dengan kerajinan batik kayu, Seiring berjalannya waktu, Padukuhan Kalakijo menjadi pelopor kerajinan batik.

4. Kawasan Wisata Kuliner Ingkung

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Karangber, Santan, Kalakijo dan Kentolan Lor. Karangber Sebagai pionir kuliner pertama budaya Ingkung menginspirasi desa-desa lain untuk turut serta mengembangkan wisata kuliner Ingkung. Sejauh ini, terdapat 15 warung Ingkung di Desa Guwosari yang berupaya meningkatkan perekonomian.

5. Kawasan Peternakan

Daerah ini meliputi Desa Bungsing yang terkenal dengan peternakan telur dan ayam pedaging.

E. Sarana dan Prasarana

Secara umum, sarana dan prasarana mengacu pada serangkaian hal yang digunakan untuk menunjang proses suatu kegiatan sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Menurut terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “fasilitas” dan “infrastruktur” adalah dua kata yang terpisah. Yang pertama adalah fasilitas. Sesuatu yang dapat dijadikan sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Kata kedua, infrastruktur, mengacu pada segala sesuatu yang secara signifikan mendukung penerapan suatu proses (bisnis, pengembangan, proyek). Dengan kata lain yang lebih sederhana, fasilitas merupakan barang bergerak dan infrastruktur bukan barang bergerak.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Guwosari khususnya yang menunjang pariwisata di Desa Guwosari antara lain pemandu lokal (pemandu wisata), penginapan atau akomodasi pribadi, mushola, kendaraan antar jemput, situs cagar budaya, toilet umum, area parkir, serta aneka kuliner khas setempat seperti Ayam Inkung yang juga menjadi wisata kuliner di Desa Guwosari yang sangat laku dan terkenal. Prasarana jalan yang memadai mulai dari gang-gang kecil hingga jalan besar membuat para pengunjung dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Papan petunjuk jalan yang tersedia di setiap sudut dan simpang jalan Desa Guwosari sangat membantu para pengunjung untuk menemukan lokasi wisata yang dituju.

F. Pemerintah Kalurahan Guwosari

Pemerintah desa adalah lembaga yang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau orang lain yang dipanggil oleh perangkat desa dan dibantu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau orang lain yang dipanggil oleh perangkat desa dan dibantu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ditetapkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, mengembangkan masyarakat Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yang selanjutnya terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur perangkat daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Struktur organisasi kantor desa di setiap desa. Struktur organisasi pemerintahan desa pada masing-masing desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang tugas atau strateginya adalah mengatur masyarakat di lingkungan desa guna tercapainya pembangunan pemerintahan.

Kalurahan Guwosari diayomi oleh suatu lembaga pemerintah Kalurahan yang dipimpin dan dijalankan oleh lurah/kepala Desa bersama dengan Carik dan perangkat Desa lainnya.

Perangkat Kalurahan Guwosari berjumlah 32 orang yang terdiri dari

1. Pamong Desa : 17 orang
2. Dukuh : 15 orang

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat Kalurahan Guwosari seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3

Tingkat Pendidikan perangkat Kalurahan Guwosari

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	S-2	0	-
2	S-1	7	21,9
3	D1-D3	2	6,3
4	SLTA	23	71,9
5	SLTP	0	-
6	SD	0	-
	Jumlah	32	100,0

Sumber data: data monografi kalurahan Guwosari 2023

Berdasarkan tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat kalurahan Guwosari adalah lulusan SLTA

Berikut di bawah ini adalah nama perangkat Pemerintah Kalurahan Guwosari:

Tabel 2.4

Nama-nama pemerintah Kalurahan Guwosari

No	Nama	L/ P	Jabatan
1	Masduki Rahmad, SIP	L	Lurah Desa
2	Nur Hidayat, S.E	L	Carik Desa
3	Muhamad Taufik	L	Kasi Pemerintahan
4	Umar Wanto	L	Kasi Kesejahteraan
5	H.M. Nizar, BA	L	Kasi Pelayanan
6	Arif Subawanto, A.Md	L	Kaur Keuangan
7	Yudi Susanto	L	Kaur TU dan Umum
8	Miftakhul Khassanah,	P	Kaur Perencanaan

	S.Hum		
9	Sulisman	L	Dukuh
10	Sagimin	L	Dukuh
11	M. Fatkhurrahman	L	Dukuh
12	Teguh Trianto	L	Dukuh
13	Muhzin Tauhid	L	Dukuh
14	Muh. Hisyam	L	Dukuh
15	Imam Muttagin	L	Dukuh
16	Widayanto	L	Dukuh
17	Sualip	L	Dukuh
18	Mudakir	L	Dukuh
19	H, Sareh Supardi	L	Dukuh
20	Anwar Aswahadi	L	Dukuh
21	Ichwan	L	Dukuh
22	Mistijan	L	Dukuh
23	Mangku	L	Dukuh
24	Jumari	L	Staf
25	Asnawi	L	Staf
26	Sryatum	P	Staf
27	Misbah, S.Ag	L	Staf
28	Dewi Iriani R, S.Pd	P	Staf
29	Waziri	L	Staf
30	Yuli Nuryanti, S.Pd	P	Staf
31	Novi Ernawati, S.E	P	Staf
32	M. Dindin Rusdan	L	Staf

Suber data: data monografi Kalurahan Guwosari 2023

Tabel 2.4 di atas menyajikan data pemerintahan Desa Guwosari berdasarkan jenis kelamin dan jabatan dan juga memberikan informasi tentang anggota pemerintahan desa yang bertindak sebagai administrator dan mengelola pemerintahan desa di Desa Guwosari. Dari data tersebut terlihat bahwa perangkat pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan lurah setempat yakni kepala desa yang berjumlah 32 orang beserta jabatannya masing-masing.

G. Pembangunan Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Berikut ada beberapa pembangunan yang ada di Kalurahan Guwosari seperti pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya.

1. Corblok jalan Pringgading RT 006-P2MK

Gambar 2.1

Pemnangan Cor Blok



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar di atas dengan adanya pembangunan corblok masyarakat Kalurahan Guwosari, alat transportasi akan terasa sangat penting untuk menghubungkan mereka Dusun ke Dusun/RT Ke RT dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya pembangunan jalan

akan mempermudah mobilitas masyarakat untuk bekerja dan melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

2. Pembangunan Talud Jalan Padukuhan Gandekan

Gambar 2.2

Pembangunan Talud Jalan



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar diatas pembangunan talud jalan merupakan untuk membantu menstabilkan tanah di daerah lereng, sehingga melindungi masyarakat dari resiko tanah longsor. Dengan adanya talud, infrastruktur jalan menjadi lebih aman untuk dilalui, terutama di Kalurahan Guwosari dengan kontur tanah yang rawan longsor. Seketika jalan menjadi lebih stabil, masyarakat dapat berpergian dengan lebih lancar tanpa khawatir gangguan akibat kerusakan jalan.

3. Pembangunan jalan usaha tani

Gambar 2.3

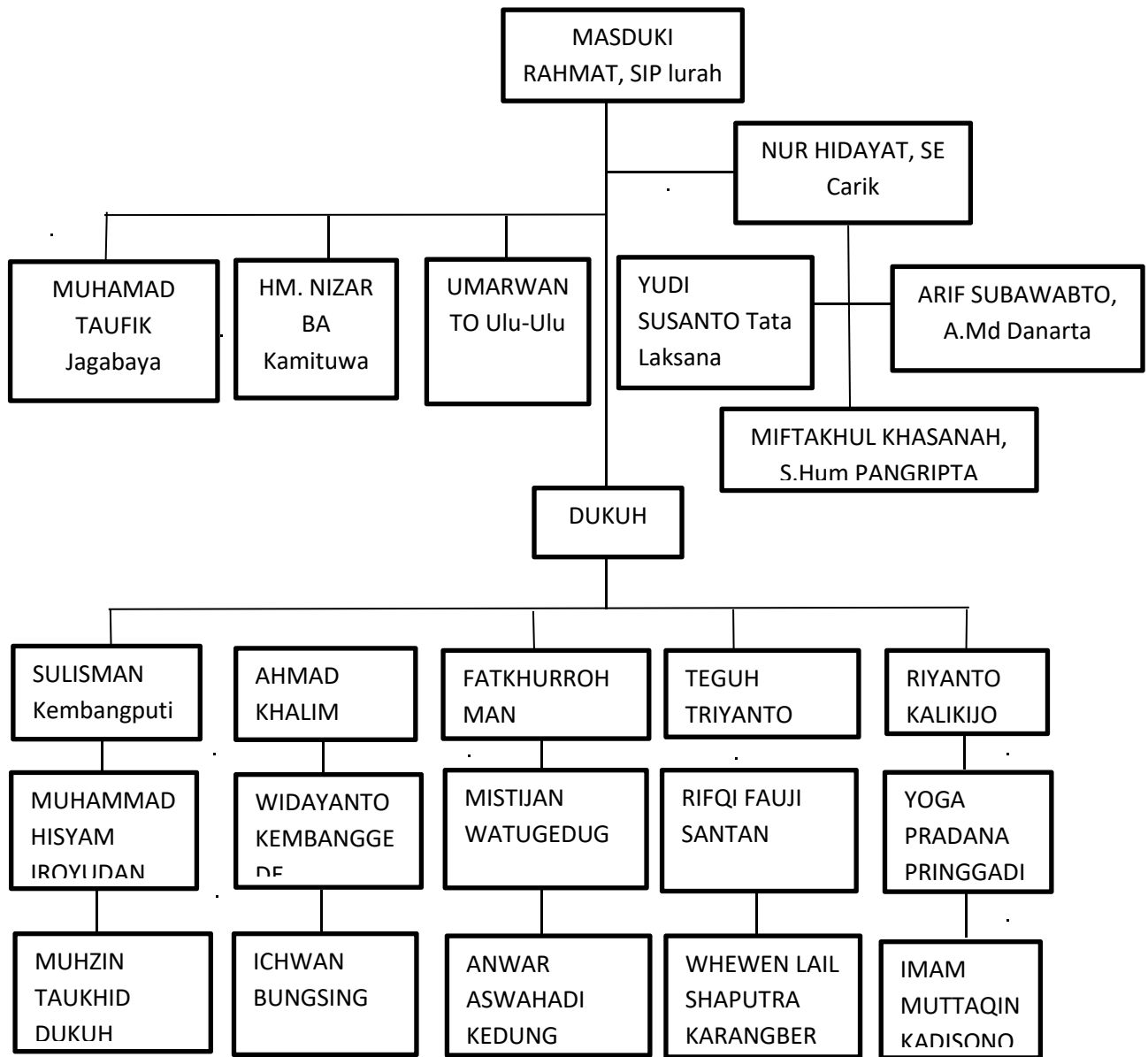
Pembanguan Jalan Usaha Tani



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar di atas bahwa pembangunan jalan usaha tani memiliki dampak yang cukup penting bagi masyarakat khususnya bagi petani Kalurahan Guwosari. Dengan adanya peningkatan akses pertanian, petani dapat lebih mudah mencapai lahan mereka, khususnya di Kalurahan Guwosari yang sulit dijangkau. Jalan yang baik memudahkan pengangkutan hasil tani ke pasar sehingga mengurangi biaya dan waktu distribusi. Infrastruktur ini mendorong perputaran ekonomi loka, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya jalan usaha tani daerah perdesaan akan menjadi lebih terhubung dan berkembang.

H. Struktur Organisasi Kalurahan Guwosari



Sumber data: Data monografi Kalurahan Guwosari 2023

Struktur organisasi Kalurahan Guwosari berdasarkan nomenklatur DIY adalah: lurah (kepala desa), Carik (sekretaris Desa), Tata Laksana (kepala urusan Tata Usaha dan Umum, Danarta (kepala urusan Keuangan), Pangripta (kepala urusan Perencanaan), Jagabaya (Kepala Seksi Pemerintahan, Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan) Kamituwa (Kepala Seksi Pelayanan), Dukuh (Dusun).

BAB III

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN

A. Kerja Sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan di Kalurahan Guwosari

Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembagian peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan. Tentunya Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan dan menganggarkan pembangunan jalan, termasuk menentukan prioritas pembangunan, lokasi, dan jenis jalan yang dibutuhkan. Sumber dananya dari Pemerintah. Pemerintah memberikan dana untuk pembangunan jalan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Perencanaan pembangunan tentunya pemerintah mengadakan musyawarah kalurahan. Perencanaan pembangunan Kalurahan Guwosari dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita-cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, dokumen tersebut harus disusun secara sistematis dan dapat menjajikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga masyarakat. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan desa mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Gambar 3.1

Cor Blok di padukuhan kembangputihan



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar di atas Pembangunan yang ada di Kalurahan Guwosari khususnya di Padukuhan Kembangputihan adalah pembangunan Cor Blok jalan Padukuhan RT 001 yang mehubungkan dengan RT 003 yang dimana sumber dananya dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang sebesar 30,000,000 Volume 1 untuk pelaksanaanya ULU-ULU tahun 2024. Tentunya pemerintah berperan merencanakan dan mengalokasikan dana untuk pembangunan tersebut. Pemerintah juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan, seperti kontraktor, dinas terkait, serta masyarakat setempat. Sedangkan Masyarakat berperan aktif dalam memberikan

masuk dan mendukung proses perencanaan jalan. Mereka dapat menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur jalan khususnya di Kalurahan Guwosari. Masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi pembangunan jalan agar proyek tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah pembangunan jalan selesai, masyarakat sering kali terlibat dalam pemeliharaan dan perawatan jalan.

Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan jalan di Desa Guwosari sangat baik dan mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan, umumnya melibatkan beberapa aspek penting pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan, sumber daya, dan pendanaan. Sementara masyarakat berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau pembangunan yang ada. Masyarakat sangat antusias dan mendukung penuh dengan memberikan sumbangsih berupa tenaga, pikiran, dan sebagainya. Pemerintah Kalurahan Guwosari melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk menyusun rencana pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Kemudian pemerintah akan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada. Masyarakat sering dilibatkan dalam pekerjaan fisik pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur desa, dengan cara kerja bakti atau program pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, hak, tanggung jawab, dan kekuatan pengambilan keputusan dibagi antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya pembangunan di Kalurahan Guwosari, masyarakat merasakan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup

mereka. Salah satu dampak yang nyata adalah peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan lain-lain. Masyarakat merasakan kemudahan dalam akses transportasi, mobilitas yang lebih lancar dan peningkatan kualitas hidup mereka. Misalnya jalan yang lebih baik akan mempermudah transportasi barang dan jasa, serta membuka peluang ekonomi baru. Hal tersebut dapat dilihat adanya kemudahan masyarakat sekitar untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pelaksanaan program pembangunan di Kalurahan Guwosari dari pihak Pemerintah Kalurahan Guwosari. Dengan demikian ada penajaman arah kemajuan dan pembangunan terhadap format pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Bapak Nur Hidayat, SE selaku Carik pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa:

“Bahwa kerja sama pemerintah dan masyarakat sangat baik. Setiap perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah mengundang masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah atau forum konsultasi dengan melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi khususnya masyarakat Kalurahan Guwosari.....” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Umarwanto selaku Ulu-Ulu Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, yang menyatakan bahwa:

“Adapun yang menjadi tujuan dari kerja sama ini adalah untuk berjalannya pembangunan perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kalurahan mengundang masyarakat seperti tokoh-

tokoh masyarakat baik RT dan Dukuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan setiap program yang ada di kalurahan”(wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Nurholis S.Sos.I selaku Bamuskal Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Dalam wawancaranya menyatakan:

“Bahwa kerja sama pemerintah dan masyarakat Kalurahan Guwosari berjalan dengan baik. Setiap program yang ada di kalurahan pasti ada musyawarah dusun sampai di tingkat Kecamatan untuk setiap pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang ada di Kalurahan Guwosari.....” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat khususnya di Kalurahan Guwosari mendukung dalam mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah Kalurahan Guwosari dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah Kalurahan Guwosari menyediakan kebijakan, sumber daya, dan fasilitas, sementara masyarakat Kalurahan Guwosari memberikan masukan, partisipasi aktif, dan pengawasan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan menjadi efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama khususnya Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Bantul. Dalam pembangunan Kalurahan Guwosari, Pemerintah Kalurahan mengikutsertakan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal

ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai target atau tidak. Di samping itu agar terciptanya suasana kebersamaan dan keterbukaan, pembangunan yang sudah direalisasikan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan

Masih terkait dengan perihal kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sulisman selaku Dukuh Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa:

“Kendalanya di dana saja. Kadang-kadang anggaran pembangunan melampaui perkiraan yang membebani ekonomi lokal. Namun dengan perencanaan yang baik dan manajemen yang tepat, banyak masalah ini dapat diminimalkan....”(wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Taufik selaku LPMK Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Muhammad Taufik menyatakan bahwa:

“Kendalanya keterbatasan anggaran. Kalau seandainya dananya mencukupi, pembangunan setiap padukuhan akan merata supaya tidak mengecewakan masyarakat atau munculnya permasalahan-permasalahan dalam pembangunan tersebut....”(wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Darmanto selaku RT 001 Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan

Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guvosari. Dalam wawancaranya Bapak Darmanto menyatakan bahwa:

“Pembangunan jalan memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk proyek tersebut, sedangkan masyarakat itu sendiri hanya bergantung pada pemerintah kalau ada pembangunan yang diselenggarakan pemerintah kami masyarakat tentunya ikut terlibat dalam pembangunan tersebut....” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Mursiti selaku perwakilan dari masyarakat Pemerintah Kalurahan Guvosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guvosari. Dalam wawancaranya Bapak Mursiti menyatakan bahwa:

“kami juga khawatir jika jalan yang dibangun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Misalnya, kualitas jalan yang buruk atau keterlambatan dalam pembangunan yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari kami sebagai masyarakat....” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2025)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Siswanto selaku RT 004 Pemerintah Kalurahan Guvosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guvosari. Dalam wawancaranya Bapak Siswanto menyatakan bahwa:

“Dengan melibatkan kami sebagai masyarakat dalam perencanaan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pembangunan jalan ini dan bisa memberikan dukungan. Selain itu, kejelasan tentang

anggaran dan dampak lingkungan itu sangat penting....” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rita selaku perwakilan masyarakat Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Ibu Rita menyatakan bahwa:

“meskipun sebagian besar warga mendukung pembangunan jalan, ada juga yang merasa tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan. Masyarakat seringkali baru mengetahui rencana pembangunan ketika sudah ada pengerjaan di lapangan.....” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kendala yang ada di pemerintah dan masyarakat pada keterbatasan anggaran. Masyarakat juga memaklumi dengan keterbatasan anggaran justru masyarakat mendukung dengan berkontribusi dalam pembangunan karena untuk kesejahteraan masyarakat juga.

B. Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan pinggir jalan

Gotong royong adalah salah satu bentuk saling tolong-menolong yang sudah menjadi tradisi di pedesaan Khususnya di Kalurahan Guwosari. Perilaku gotong royong sangat relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat. Aktivitas ini menciptakan kerjasama antara individu, dengan kelompok, serta antar kelompok, yang pada gilirannya membangun norma saling percaya untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dengan

demikian, gotong royong adalah salah satu wujud solidaritas sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 3.2

Kerja sama dalam bergotong-royong



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar di atas Kerja sama masyarakat Kalurahan Guwosari dalam pembangunan berjalan dengan baik. Keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dilakukan dalam berbagai tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Kerja sama masyarakat Kalurahan Guwosari bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat Kalurahan Guwosari sering terlibat dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan lingkungan, membangun

fasilitas umum, atau merayakan acara budaya dan tradisi. Kegiatan seperti ini memperkuat ikatan sosial antar warga dan mempererat rasa kebersamaan. Kerja sama masyarakat Kalurahan Guwosari sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Guwosari sendiri. Keterlibatan masyarakat juga membantu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan dan keberlanjutan kalurahan.

Di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul terdapat sebuah Padukuhan yang selalu menjalin hubungan sinergis. Mereka membangun kerjasama tidak hanya dalam profesi dalam pembangunan, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Misalnya, mereka sering bergotong-royong dalam pembersihan pinggir jalan, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Semua aktivitas tersebut mencerminkan bahwa masyarakat di Kalurahan Guwosari masih mempertahankan nilai-nilai tradisional dan menghidupkan budaya gotong royong. Hal ini berkontribusi dalam memelihara hubungan yang akrab antara Pemerintah dan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa solidaritas di antara mereka tetap terjaga dengan baik dan masih sangat kuat, seperti yang diungkapkan dalam pernyataan berikut. Bapak Nur Hidayat, SE selaku Carik di Kalurahan Guwosari menyatakan bahwa:

“Kerja sama masyarakat Kalurahan Guwosari atau perwakilan masyarakat sepenuhnya diikutsertakan dengan adanya pembersihan jalan, sehingga masyarakat merasa puas dan akhirnya secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam melestarikan

pembangunan yang telah direalisasikan sambil merancang berbagai program pembangunan kalurahan pada tahap-tahap selanjutnya..” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sulisman selaku Dukuh di Padukuhan Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Dalam wawancaranya, Bapak Sulisman menyatakan:

“Bahwa kerja sama masyarakat khususnya di Padukuhan Kembangputihan berjalan dengan baik. Setiap ada program dari Kalurahan kami menyelenggarakan musdus (musyawarah Dusun) untuk menyepakati program-program dari Kalurahan. Setiap adanya pembangunan atau pembersihan jalan masyarakat Kembangputihan ikut serta yang dimana diprogramkan dari pemerintah Kalurahan.....” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Berkaitan tentang kerja sama masyarakat dalam pembersihan jalan di Kalurahan Guwosari. Bapak Darmanto selaku Tokoh masyarakat di Kembangputihan Kalurahan Guwosari yang menyatakan bahwa:

“Kalau ada pembangunan atau pembersihan lingkungan dari program pemerintah, kami sebagai masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan pembersihan jalan demi kesejahteraan kami sebagai masyarakat...”(wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Siswanto selaku RT 004 di Padukuhan Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Dalam wawancaranya Bapak Siswanto menyatakan bahwa:

“Kerja sama masyarakat dilakukan baik setiap kegiatan-kegiatan yang ada baik di padukuhan, kalurahan, dan kalau ada di tingkat kecamatan. Kami sebagai masyarakat ikut bekerja sama dengan adanya program-program yang ada” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Taufik selaku lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan saat diwawancarai bagaimana tingkat kerja sama pemerintah dan masyarakat.

“Mengenai tingkat kerja sama, khususnya masyarakat padukuhan sangat bagus dan positif sekali. Artinya apapun itu pembangunan baik infrastruktur jalan,selokan dan pembersihan jalan, selalu ada kerja sama masyarakat dan setiap program dari kalurahan...” wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kerja sama masyarakat dalam bergotong-royong, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan serta aspirasi masyarakat itu sendiri. Kerja sama masyarakat dalam kegiatan pembersihan jalan memperkuat hubungan sosial antar warga seperti gotong royong dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat selama ini bahwa modal sosial masih ada, rasa kepedulian terhadap sesama. Mereka ingin menjadi bagian penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan. Beberapa tahapan partisipasi masyarakat Kalurahan Guwosari memberikan gambaran bahwa keterlibatan mulai dari perencanaan sangat diperlukan sehingga bisa menikmati hasil yang dilakukannya. Mulai dari keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil. Upaya pemerintah Kalurahan Guwosari mendorong partisipasi

masyarakat dalam pembangunan kalurahan melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang proses pengambilan keputusan pengambilan kebijakan dalam pembangunan, pengusulan rencana pembangunan melalui musyawarah kalurahan.

Masih terkait dengan perihal kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan pinggir jalan, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mursiti di Padukuhan Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, yang menjawab saat diwawancarai kendala seperti apa kerja sama masyarakat dalam pembersihan pinggir jalan

“Untuk kendala biasanya dari masyarakat yaitu masalahnya tidak semuanya ikut dalam pembersihan jalan karena banyak masyarakat yang bekerja baik itu kerja kantoran dan lain-lain. Kalau untuk kerja sama dalam pembersihan pinggir jalan berjalan dengan baik.....”(wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Nurholis S.Sos.I selaku Bamuskal Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Dalam wawancaranya mengatakan:

“Untuk kendalanya hanya keterbatasan waktu saja karena tidak semuanya ikut bekerja sama tentunya masyarakat punya kesibukan masing-masing. Kalau untuk kerja sama masyarakat sangat baik.”(Wawancara 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Umarwanto selaku Ulu-Ulu Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Umarwanto menyatakan bahwa:

“Gotong royong sudah menjadi budaya yang kuat di sini. Warga sadar bahwa jalan yang bersih akan mempermudah akses transportasi, mencegah banjir, dan memberikan kesan positif terhadap lingkungan sekitar. Setiap kali ada kegiatan pembersihan jalan, kami mengajak semua warga untuk ikut berpartisipasi, karena pembersihan jalan merupakan kepentingan bersama...” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025)

Pendapat yang berbeda yang diungkapkan oleh Ibu Rita selaku perwakilan dari masyarakat Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa kendala dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembersihan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Ibu Rita menyatakan bahwa:

“Terkadang, waktu yang terbatas menjadi kendala. Banyak warga yang sibuk dengan pekerjaan mereka, jadi tidak semua orang bisa hadir dalam kegiatan gotong royong....” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2025).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa kerja sama masyarakat sangat baik sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan menyusun anggaran dapat membantu kelancaran pembangunan.

C. Faktor yang mendukung Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat

Pemerintah Kalurahan Guwosari seringkali membutuhkan masukan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program yang lebih efektif dengan melibatkan masyarakat. Program-program tersebut lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi membantu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan,

mereka akan lebih mendukung kebijakan yang ada dan berperan aktif dalam implementasinya. Kolaborasi yang terbuka dan transparan dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting untuk memperlancar komunikasi dan mengurangi ketegangan antara keduanya. Banyak masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau masalah lingkungan, membutuhkan solusi yang melibatkan semua pihak. Pemerintah Kelurahan Guvosari tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian, sehingga kolaborasi dengan masyarakat bisa memperkaya ide dan solusi yang lebih inovatif.

Gambar 3.3

Pembangunan Infrastruktur jalan



Sumber: data lapangan penelitian 2025

Dari gambar di atas guna meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur jalan dan memperlancar akses masyarakat, Pemerintah Provinsi DIY merealisasikan adanya Program Padat Karya. Program tersebut merupakan program yang dibiayai dengan anggaran Bantuan

Keuangan Khusus (BKK) dari pemerintah DIY. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Program Padat Karya Infrastruktur BKK Provinsi DIY dilaksanakan di 116 titik se Kabupaten Bantul, salah satunya di Padukuhan Watugedug. Setiap titik dialokasikan anggaran sebesar 180 juta. Dalam hal ini mahasiswa KKN-T Universitas Alma Ata kelompok 14 Guwosari membantu warga Padukuhan Watugedug, Guwosari dalam melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan Program Padat Karya tersebut yaitu mulai pada tanggal 21 Juni 2022 hingga 12 Juli 2022. Lokasi tersebut berada di Padukuhan Watugedug RT 04, Guwosari, Pajangan, Bantul. Pembangunan jalan ini dilakukan oleh 52 orang pekerja yang terdiri dari dua ketua kelompok, 10 tukang dan 40 pekerja. Panjang jalan yang dibangun kurang lebih 433 meter dengan lebar 2,5 meter dan tebal 10 cm. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk mempermudah akses jalan warga dan memperlancar aktivitas warga Padukuhan Watugedug khususnya warga RT 04.

Kolaborasi ini dapat memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol lebih besar atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, masyarakat merasa lebih memiliki dan berhak atas pembangunan. Pemerintah mendapatkan wawasan lebih dalam dari masyarakat mengenai kondisi riil di lapangan. Masyarakat juga mengetahui tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat bermanfaat dalam perencanaan kebijakan. Kolaborasi yang kompak antara pemerintah dan masyarakat berpotensi

menciptakan hasil yang lebih baik dan membangun harmoni dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Bapak Nur Hidayat, SE selaku Carik Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. saat diwawancarai dalam pembangunan Kalurahan Guwosari menyatakan:

“Pemerintah Kalurahan Guwosari mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal supaya dapat memotivasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam kolaborasi dengan pemerintah sehingga meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan dapat mendorong lebih banyak orang untuk terlibat....” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Taufik selaku lembaga pemberdayaan masyarakat kalurahan (LPMK) di Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Saat diwawancarai yang mendorong kolaborasi dalam pembangunan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Muhammad Taufik menyatakan:

“Ketika ada program atau tujuan dari pemerintah Kalurahan Guwosari yang penting bagi pemerintah dan masyarakat, seperti kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, atau kelestarian lingkungan, kolaborasi lebih mudah terjalin....” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Darmanto selaku Ketua RT 001 di Padukuhan Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Dalam wawancaranya Bapak Darmanto menyatakan:

“dengan adanya kolaborasi ini, masyarakat dapat merasakan peningkatan dalam pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi. Pemerintah bekerja sama dengan kami sebagai masyarakat lebih memahami kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran....” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Dari hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa ketika ada tujuan atau isu penting yang sama-sama ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat, seperti pembangunan, ekonomi, kesejahteraan sosial, atau pelestarian lingkungan, maka kolaborasi lebih mudah terjalin karena kedua belah pihak merasa memiliki kepentingan yang sama. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertindak jujur dan bertanggung jawab, mereka akan lebih bersedia untuk bekerja sama dalam berbagai program dan proyek yang ada di Kalurahan Guwosari.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat masyarakat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik sesuai kondisi yang ada di masyarakat. Kolaborasi memungkinkan pemanfaatan potensi lokal untuk pengembangn desa, baik dalam bidang pertanian, pariwisata, kerajinan, atau sektor lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di desa, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan desa. Hal ini membuat masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah pola untuk mencapai kemajuan desa yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta

memanfaatkan potensi lokal, desa dapat berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui strategi yang tepat, kolaborasi ini dapat ditingkatkan dan mendorong pertumbuhan yang lebih baik.

Jawaban yang berbeda juga diungkapkan Bapak Mursiti selaku perwakilan dari masyarakat saat diwawancarai kendala pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. mengatakan bahwa:

“Memang politik itu khususnya DPR itu pengaruh besar kalau tidak menang itu sulit untuk mencari tokoh-tokoh. Seandainya menang DPRD turun langsung ke masyarakat. Kalau tidak menang itu disingkirkan dulu pembangunan artinya pembangunan itu tidak berjalan...” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2025).

Dari hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat berjalan baik jika pilihan mereka itu menang. Jika tidak menang pembangunan itu tidak berjalan.

Jawaban yang berbeda juga diutarakan Ibu Rita selaku perwakilan perempuan masyarakat saat diwawancarai dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan. menyatakan bahwa:

“Untuk dampak yang dirasakan masyarakat baik dan positif. Dengan adanya pembangunan justru senang dengan adanya pembangunan, karena adanya pembangunan ini tujuannya untuk kesejahteraan kami sebagai masyarakat...” (wawancara pada tanggal 5 Januari 2025).

Jawaban yang sama juga diutarakan Bapak Sulisman selaku Dukuh Padukuhan Kembangputihan saat diwawancarai dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembangunan, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pembangunan di padukuhan masyarakat justru senang dan masyarakat ikut serta dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat juga, karena untuk kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri...” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Umarwanto selaku Ulu-Ulu Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Umarwanto menyatakan bahwa:

“Masyarakat di Kalurahan ini umumnya merasa bahwa kolaborasi dengan pemerintah sangat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Ketika masyarakat merasa terlibat dan dihargai, mereka cenderung lebih aktif mendukung kebijakan yang ada....” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Siswanto selaku RT 004 di Padukuhan Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Siswanto menyatakan bahwa:

“kami masyarakat hanya ingin semua bisa saling menghargai dan bekerja bersama-sama, baik itu pemerintah maupun masyarakat, hasil yang didapat akan lebih baik...” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Nurholis. S.Sos.I selaku Bamuskal Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai kendala seperti apa dengan adanya

kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan Kalurahan Guwosari. Dalam wawancaranya Bapak Nurholis. S.Sos.I menyatakan bahwa:

“Harapan kami, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dengan adanya saling pengertian dan keterbukaan. Kami ingin masyarakat terus berperan aktif dalam setiap keputusan yang diambil, karena kami percaya bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan desa yang lebih maju dan sejahtera...” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2025).

Dari hasil wawancara di atas dinyatakan bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat baik dan positif dengan adanya pembangunan dari pemerintahan. Masyarakat senang dan ikut serta dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas dinyatakan bahwa, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam atau serangkaian kegiatan untuk memungkinkan pemerintah desa Guwosari mendukung program yang dilaksanakan sesuai rencana. Tentu saja penting untuk mempertahankan program tahun sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada penjelasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya serta sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja sama pemerintah dan masyarakat khususnya di Kalurahan Guwosari mendukung dalam mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah Kalurahan Guwosari dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah Kalurahan Guwosari menyediakan kebijakan, sumber daya, dan fasilitas, sementara masyarakat Kalurahan Guwosari memberikan masukan, partisipasi aktif, dan pengawasan.
2. Kerja sama masyarakat dalam kegiatan pembersihan jalan memperkuat hubungan sosial antar warga seperti gotong royong dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial.
3. Faktor yang mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat, masyarakat desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik sesuai kondisi yang ada di masyarakat. Kolaborasi memungkinkan pemamfaatan potensi lokal untuk pengembangan

desa, baik dalam bidang pertanian, pariwisata, kerajinan, atau sektor lainnya

B. Saran

Dengan melihat hasil dalam penelitian tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan jalan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu lebih aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan jalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
2. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). *Perencanaan pembangunan desa*. *Meraja journal*, 2(2), 135-147.
- Antono, A., Setiahadi, M., & Ngelimun, N. (2020). *Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 102-108.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). *Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong*. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221-234.
- Febrian, R. A. (2015). *Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi)*. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 1(2), 200-208.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). *Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)*. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 1)*.
- Fazar, N. (2022). *Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pembangunan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*.
- Fauzan, A. (2010). *Implementasi peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)*.
- Gumilar, E. R., Khaerunnisa, F., Lutfiah, F., Tammi, H. I., & Jaliluddin, J. (2021). *Kolaborasi Peran Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2727-2734.
- Hartomi, H., Sopandi, A., & Irham, I. (2023). *Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur Desa Jayalaksana*. *An-Nizam*, 2(3), 80-87.
- INDONESIA, P. R. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan. Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota, IPEM4542/M*, 23-24.

- Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 213-220.
- Pasaribu, A., Sitanggang, A., & Ivanna, J. (2024). *Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Percut Sei Tuan Dusun 1. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 268-275.
- Pasaribu, A., Sitanggang, A., & Ivanna, J. (2024). *Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Percut Sei Tuan Dusun 1. Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(01), 268-275.
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). *Optimalisasi kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan rencana kerja pembangunan desa. Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 44-58.
- RIZHTI, R. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Studi Desa Kertosari Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).*
- Saleh, C. (2020). *Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. Pustaka Universitas Terbuka*, 1.
- Sellang, K., Ahmad, J., Adnan, A. A., Nonci, N., Muliani, S., Mustanir, A., ... & Barisan, B. (2024). *Desa Pintar: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Digital (Menekankan Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Membangun Desa Digital).*
- Tasruddin, R. (2015). *Proses kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Komodifikasi*, 2(1).
- <https://jdih.jogjaproprov.go.id/hukum/peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-93-tahun-2020-tentang-desakalurahan-mandiri-budaya>



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN GUWOSARI

ꦏꦁꦸꦱꦺꦴꦱꦂꦶꦫꦪꦲꦶꦪꦸꦢꦤ꧀ꦏꦁꦸꦱꦺꦴꦱꦂꦶꦏꦁꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦥꦗꦁꦤ꧀ꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jl. Guwosari Raya Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten
Bantul, Telp/WA 0274 6461041

Kode Pos 55751 Website : guwosari.desa.id e-mail desa.guwosari@bantulkab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 400.14.5.4/631

Memperhatikan : Surat dari : STPMD APMD YOGYAKARTA
Nomor : 962/I/U/2024
Tanggal : 10 Desember 2024
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Pemerintah Kalurahan Guwosari, memberikan izin kepada :

1. Nama : JEKSON
2. NIM : 21520098
3. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
4. No. HP/WA : 081365631370

Untuk melaksanakan Izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a) Judul Skripsi : *Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan Studi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul*
- b) Lokasi : Kalurahan Guwosari
- c) Waktu izin : 27 Desember 2024 – 27 Januari 2025
- d) Status izin : Baru

Ketentuan yang harus ditaati :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya diberikan untuk kegiatan sesuai izin yang diajukan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk **hardcopy (hardcover)** dan **softcopy(CD)** kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari setelah selesai melaksanakan kegiatan;
7. Izin dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Guwosari

Pada tanggal : 27 Desember 2024

Lurah Guwosari

Carik



NUR HIDAYAD, S.E



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 – Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JEKSON
No Mahasiswa : 21520098
Judul Skripsi : Kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur engineer, kaurdan Triwiblat
Dosen Pembimbing : Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A
Mulai Bimbingan : Tanggal 14 Oktober 2021

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
14/10/21	latar belakang masalah	Pasi
28/10/21	latar belakang Fokus Penelitian	Pasi
4/11/21	kerangka teoritis	Pasi
14/11/21	kerangka konseptual	Pasi
25/11/21	kerangka konseptual dan metodologi penelitian	Pasi
28/11/21	Rumusan masalah	Pasi
9/12/21	Acc proposal	Pasi
3/12	Analisis data dan layanan	Pasi
13/12	Uraian Penelitian	Pasi
21/12	Penelitian	Pasi
31/12	Penelitian	Pasi
5/2	Penelitian & Analisis Survei	Pasi
6/2	Acc uraian Skripsi	Pasi

--	--	--

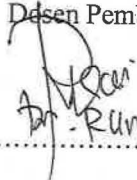
Mengetahui / Menyetujui

Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi

.....

Dosen Pembimbing


Dr. Rungsa Hs, SIP, MPA
.....



RANCANGAN PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA GUWOSARI
PERIODE 2018 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Guwosari Tahun 2018-2024;
- b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Guwosari, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Guwosari Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 145;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN (RKPAL) TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MASDUKI RAHMAD, SIP : Lurah Guwosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. H. MUH. JUREMI, S.Sos : Ketua Bamuskal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Guwosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan apabila semua proses telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Lurah Guwosari


MASDUKI RAHMAD, SIP

Ketua Bamuskal


H. MUH. JUREMI, S.Sos



**Kantor Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan,
Kabupaten Bantul**



**Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, SE selaku Carik pemerintah
Kalurahan Guwosari**



**Wawancara dengan Bapak Nurholis. S.Sos.I selaku BAMUSKAL
Kalurahan Guwosari**



**Wawancara dengan Bapak Mursiti selaku perwakilan
dari masyarakat**



**Wawancara dengan Ibu Rita selaku perwakilan
perempuan masyarakat**



**Wawancara dengan Bapak Siswanto selaku RT 004 di padukuhan
kembangptihan Pemerintah Kalurahan Guwosari**



**Wawancara dengan Bapak Sulisman selaku Duku di Padukuhan
Kembangputihan, Kalurahan Guwosari**



**Wawancara dengan Bapak Umarwanto selaku Ulu-Ulu Pemerintah
Kalurahan Guwosari**



**Wawancara dengan Bapak Darmanto selaku ketua RT 001 di Padukuhan
Kembangputihan Pemerintah Kalurahan Guwosari**



Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik selaku lembaga permusyawaratan masyarakat kalurahan (LPMK) di Kalurahan Guwosari



**BAMUSKAL
GUWOSARI**

Agenda Bamuskal



**Musyawah Perencanaan Pembangunan Kalurahan
(Musrenbangk) Guwosari Tahun Anggaran 2025**



Pertemuan LPMK di Masjid rapat pembahasan pembangunan